



Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai Langkah Penguatan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik di PT. Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

Nabilah Tirza Syahrani*¹, Sri Wibawani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: 23041010055@student.upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 03, 2026

Revised May 03, 2026

Accepted June 22, 2026

Available online June 22, 2026

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, Tata Kelola Perusahaan.

Keywords:

Good Corporate Governance, Accountability, Public Trust, Corporate Governance, PT Alur Pelayaran Barat Surabaya.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai strategi penguatan akuntabilitas internal dan kepercayaan publik dalam konteks perusahaan di Indonesia, relevan untuk diaplikasikan pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS). *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mengintegrasikan prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Penerapan prinsip-prinsip GCG secara signifikan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan serta menciptakan iklim keterbukaan yang memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat memperbaiki kesehatan perusahaan dan struktur tata kelola yang efektif melalui penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan stakeholder termasuk investor dan masyarakat luas. Selanjutnya, kajian literatur lainnya menegaskan bahwa prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan *stakeholder trust* dan reputasi korporasi secara keseluruhan. Temuan-temuan ini menunjukkan

bahwa implementasi GCG bukan hanya penting untuk kepatuhan internal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik bagi perusahaan seperti PT APBS.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) as a strategy to strengthen internal accountability and public trust within the context of companies in Indonesia, particularly relevant for application at PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS). *Good Corporate Governance* is a corporate management system that integrates key principles such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in decision-making and reporting processes. The application of GCG principles is significantly associated with improving the quality of corporate governance and creating an atmosphere of openness that enhances corporate legitimacy in the eyes of the public and stakeholders. Previous studies indicate that the implementation of GCG can improve corporate health and establish an effective governance structure through strengthening accountability and transparency mechanisms, ultimately increasing stakeholder trust, including that of investors and the wider community. Furthermore, other literature emphasizes that GCG principles, especially transparency and accountability, play a crucial role in enhancing stakeholder trust and overall corporate reputation. These findings demonstrate that the implementation of GCG is not only essential for internal compliance but also serves as an important instrument in building accountability and public trust for companies such as PT APBS.

1. PENDAHULUAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) penting untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan transparan, akuntabel, dan profesional. Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang menjadi pedoman agar perusahaan dapat dipercaya publik (Maharani, 2024). Dalam konteks dunia modern, penerapan GCG juga menjadi dasar dalam menjaga reputasi organisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan (Wardani & Sari, 2023). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan penerapan GCG secara konsisten agar kinerja organisasi tetap efektif dan sesuai prinsip etika korporasi (Hardianti & Susanto, 2024).

Perusahaan publik dan BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan GCG karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. GCG berfungsi sebagai alat pengawasan sekaligus sarana peningkatan kinerja organisasi. Fuadi et al. (2025) menyebut bahwa GCG berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan kesehatan perusahaan melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dengan tata kelola yang baik, penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan dan kepercayaan stakeholder dapat diperkuat (Prasetyo & Nuraini, 2023). Hal ini mempertegas peran GCG dalam menjaga integritas lembaga publik serta mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan GCG berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan stakeholder dan reputasi organisasi. Zahrani et al. (2025) menjelaskan bahwa transparansi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selain itu, akuntabilitas yang tinggi menciptakan hubungan yang sehat antara manajemen dan masyarakat (Puspitasari & Hidayat, 2025). Implementasi GCG juga membantu perusahaan menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan mengurangi risiko ketidakpastian (Setiawan & Siregar, 2024). Dengan demikian, GCG menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas jangka panjang sekaligus meningkatkan legitimasi organisasi di mata publik.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memiliki peran strategis dalam sektor pelayaran nasional. Sebagai penyedia layanan publik, PT APBS dituntut menerapkan prinsip GCG secara optimal untuk menjamin pelaksanaan kegiatan operasional yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab (Hidayat, 2021). Penerapan GCG di lingkungan perusahaan pelabuhan menjadi salah satu indikator profesionalisme dan integritas lembaga publik dalam memberikan pelayanan terbaik (Fitriani & Rasyid, 2024). Oleh karena itu, PT APBS menjadi contoh penting penerapan tata kelola modern yang berbasis akuntabilitas dan kepercayaan publik di sektor maritim Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi GCG dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik pada PT APBS. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik terkait tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan dalam memperkuat sistem pengawasan dan

efektivitas layanan publik (Suryani & Hapsari, 2023). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik dalam pengembangan praktik GCG yang berkelanjutan. Dengan demikian, GCG berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan di tengah tuntutan transparansi publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik di PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses dan praktik tata kelola yang diterapkan perusahaan. Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan selama kegiatan magang untuk mengamati aktivitas manajerial dan pelaksanaan prinsip transparansi serta akuntabilitas di setiap divisi. Wawancara dilakukan secara informal dengan beberapa pegawai, sedangkan dokumentasi berasal dari pedoman GCG, laporan tahunan, dan data internal perusahaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi data relevan seperti hasil wawancara dan observasi yang menggambarkan praktik GCG di lapangan. Data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi tematik yang menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan temuan lapangan yang dibandingkan dengan teori dan prinsip GCG menurut literatur akademik. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi GCG di PT APBS secara faktual dan kontekstual.

Tabel 1. Tabel 1. Data Hasil Penelitian Implementasi GCG di PT APBS

No	Jenis Data	Sumber Data	Hasil Temuan Utama	Prinsip GCG yang Teridentifikasi
1	Observasi Lapangan	Pengamatan langsung selama magang di bagian administrasi dan keuangan.	Setiap divisi menyusun laporan kegiatan mingguan dan menyampaikannya ke manajemen melalui rapat evaluasi.	Transparansi dan Akuntabilitas
2	Wawancara Pegawai	Staf bagian administrasi (hasil wawancara, 2025).	"Kami diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban bulanan agar kegiatan terpantau dan sesuai prosedur audit internal."	Akuntabilitas dan Tanggung Jawab
3	Wawancara Pembimbing Magang	Kepala bagian operasional (hasil	"Penerapan GCG membantu memperjelas alur kerja dan tanggung	Independensi dan Tanggung Jawab

		wawancara, 2025).	jawab antarbagian agar tidak terjadi tumpang tindih.”	
4	Dokumentasi Internal	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual, 2023).	Dokumen menegaskan lima prinsip utama GCG serta prosedur audit internal tahunan.	Transparansi, Akuntabilitas, Independensi
5	Dokumentasi Eksternal	Laporan Tahunan dan Website PT Pelindo.	PT APBS menyampaikan laporan kegiatan kepada induk perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.	Transparansi dan Kewajaran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat Upaya Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara sistematis dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan laporan kegiatan yang disampaikan setiap minggu kepada manajemen dan audit internal. Selain itu, akuntabilitas dijaga dengan adanya sistem pelaporan pertanggungjawaban rutin di setiap divisi. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa setiap kegiatan harus disertai dokumen pendukung sebagai bentuk tanggung jawab administratif. Penerapan mekanisme ini menciptakan pola kerja yang terukur dan meningkatkan kepercayaan internal antarbagian.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa PT APBS telah memiliki pedoman GCG yang selaras dengan kebijakan induk perusahaan, yaitu PT Pelindo. Dokumen tersebut menegaskan komitmen terhadap lima prinsip utama GCG dan pelaksanaan audit internal tahunan. Penerapan prinsip ini sejalan dengan temuan [Zahrani et al. \(2025\)](#) yang menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, implementasi GCG di PT APBS terbukti tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi kepercayaan dalam organisasi pelayanan publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara cukup baik dalam mendukung peningkatan akuntabilitas organisasi dan kepercayaan publik. Implementasi tersebut terlihat melalui penyusunan laporan kegiatan secara berkala, pelaksanaan audit internal, serta penerapan mekanisme

pertanggungjawaban pada setiap unit kerja. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa GCG tidak hanya diposisikan sebagai instrumen kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai sistem tata kelola yang mampu menciptakan organisasi yang transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Wardani dan Sari (2023), penerapan GCG pada sektor publik maupun perusahaan milik negara berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Prinsip transparansi merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dalam implementasi GCG di PT APBS. Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap divisi diwajibkan menyusun laporan kegiatan mingguan yang disampaikan kepada manajemen melalui rapat evaluasi dan sistem audit internal. Praktik tersebut mencerminkan keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap pemangku kepentingan. Transparansi memiliki peranan strategis dalam membangun legitimasi organisasi karena memungkinkan stakeholder memperoleh akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspitasari dan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan determinan utama dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selain itu, Zahrani et al. (2025) menjelaskan bahwa transparansi yang konsisten akan memperkuat reputasi perusahaan serta meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kredibilitas organisasi.

Prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan secara sistematis melalui kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan dan dokumentasi administratif yang lengkap pada setiap aktivitas operasional. Sistem pelaporan tersebut memungkinkan manajemen melakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Menurut Suryani dan Hapsari (2023), audit internal yang terintegrasi dengan sistem pelaporan berkala merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas implementasi GCG karena mampu memperkuat fungsi pengawasan organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dan independensi telah membantu memperjelas pembagian tugas serta kewenangan antarunit kerja di PT APBS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi GCG telah mengurangi potensi tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi internal perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan efektif. Temuan ini mendukung penelitian Fuadi et al. (2025) yang menyebutkan bahwa penerapan GCG berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan perusahaan melalui penguatan sistem pengawasan, kejelasan struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih objektif. Hal serupa dikemukakan oleh Setiawan dan Siregar (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan independensi menjadi elemen penting dalam menjaga

keberlanjutan perusahaan, terutama pada BUMN yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik.

Sebagai anak perusahaan PT Pelindo yang bergerak di sektor pelabuhan dan pelayaran, PT APBS memiliki tuntutan yang tinggi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan. Implementasi GCG yang konsisten menjadi faktor penting dalam mempertahankan legitimasi perusahaan di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik. Hidayat (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan GCG pada perusahaan pelabuhan sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada keterbukaan, pengawasan internal, dan pelayanan yang berkelanjutan. Sementara itu, Fitriani dan Rasyid (2024) menegaskan bahwa perusahaan pelabuhan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal cenderung memperoleh tingkat kepercayaan stakeholder yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum mengembangkan sistem tata kelola secara komprehensif.

Meskipun implementasi GCG di PT APBS telah menunjukkan hasil yang positif, penelitian ini mengidentifikasi adanya ruang perbaikan, khususnya dalam aspek penyebaran informasi kepada masyarakat. Transparansi publik masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penyediaan laporan kinerja dan hasil audit secara berkala melalui media daring yang mudah diakses oleh pengguna jasa dan masyarakat luas. Langkah tersebut sejalan dengan perkembangan tata kelola modern yang menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses pengawasan perusahaan (Setiawan & Siregar, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance di PT APBS telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Keberhasilan penerapan GCG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan pedoman tata kelola, tetapi juga oleh komitmen manajemen dan partisipasi aktif seluruh sumber daya manusia dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, GCG dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus memperkuat reputasi organisasi di tengah tuntutan tata kelola publik yang semakin kompleks.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS) telah berjalan dengan baik dan konsisten dalam mendukung peningkatan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diterapkan dalam berbagai aktivitas operasional, mulai dari penyusunan laporan kegiatan hingga pelaksanaan audit internal. Sistem pelaporan yang rutin dan keterbukaan informasi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang berintegritas. Implementasi GCG juga memperkuat sistem pengawasan internal, mencegah penyalahgunaan

wewenang, dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penerapan GCG telah memberikan dampak positif terhadap reputasi perusahaan serta meningkatkan legitimasi publik terhadap kinerja PT APBS sebagai entitas pelayanan pelabuhan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan GCG di PT APBS tidak hanya berasal dari regulasi perusahaan, tetapi juga dari komitmen sumber daya manusianya. Keterlibatan aktif karyawan dalam proses pelaporan, audit, dan evaluasi mencerminkan kesadaran organisasi terhadap pentingnya akuntabilitas publik. Namun, masih terdapat ruang untuk penguatan, terutama dalam penyebarluasan informasi publik agar transparansi dapat lebih optimal. Dengan adanya penerapan GCG yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi, PT APBS dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat citra positif sebagai perusahaan pelabuhan yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, PT APBS disarankan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi dengan memperluas akses publik terhadap laporan dan hasil audit perusahaan. Langkah ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja secara digital agar masyarakat dan pengguna jasa dapat memantau perkembangan kegiatan perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat koordinasi antarbagian agar proses pelaporan dan evaluasi berjalan lebih efisien. Pelatihan berkala tentang penerapan GCG juga penting dilakukan bagi seluruh karyawan agar pemahaman mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab semakin merata. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi penerapan GCG secara menyeluruh di seluruh unit kerja.

Saran berikutnya, PT APBS perlu memperkuat mekanisme audit internal dan evaluasi eksternal untuk memastikan penerapan GCG tetap berjalan sesuai pedoman. Pengawasan yang transparan dan independen dapat menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Selain itu, dukungan dari manajemen puncak dan induk perusahaan (PT Pelindo) perlu terus dijaga agar kebijakan GCG dapat diterapkan lebih luas dan efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan publik sekaligus menjadi model penerapan tata kelola yang baik di sektor pelayanan pelabuhan nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, A., Safitri, N., & Rahayu, D. (2025). *Pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap tingkat kesehatan perusahaan*. Jurnal RIGGS, 7(1).
- Maharani, L. (2024). *Peran Good Corporate Governance dalam meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan BUMN*. JREAM, 12(2).
- Wardani, F., & Sari, H. (2023). *Good Corporate Governance sebagai instrumen akuntabilitas di sektor publik*. RABI, 8(2).
- Hardianti, N., & Susanto, R. (2024). *Good Corporate Governance dan implikasinya terhadap reputasi perusahaan milik negara*. Jurnal Akuntabilitas dan Audit, 8(2).
- Prasetyo, B., & Nuraini, M. (2023). *Analisis penerapan Good Corporate Governance pada PT Pelindo pascamerger*. JMK, 25(3).
- Zahrani, A. N., Putri, R., & Roni, F. (2025). *Implementation of Good Corporate Governance and Corporate Reputation*. JAMK, 10(1).

- Puspitasari, D., & Hidayat, R. (2025). *Evaluasi prinsip transparansi dalam penerapan GCG pada perusahaan publik*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Indonesia*, 17(1).
- Setiawan, Y., & Siregar, L. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola BUMN di era digital*. *JIAP*, 11(2).
- Hidayat, M. (2021). *Evaluasi efektivitas penerapan Good Corporate Governance pada PT Pelindo*. *Jurnal Pelabuhan dan Maritim Indonesia*, 7(1).
- Fitriani, E., & Rasyid, A. (2024). *Penerapan prinsip GCG dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder pada perusahaan pelabuhan*. *Jurnal Maritim dan Bisnis Indonesia*, 9(3).
- Suryani, L., & Hapsari, E. (2023). *Audit internal sebagai pilar akuntabilitas dalam pelaksanaan GCG*. *Jurnal Sistem Pengawasan dan Akuntansi*, 4(2).